

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Literasi Keuangan

Pengelolaan keuangan atau aset secara benar merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki setiap individu khususnya di era globalisasi saat ini. Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan tersebut mampu membuat seseorang terhindar dari masalah keuangan, misalnya kemiskinan. Namun saat ini kemiskinan tidak hanya disebabkan karena pendapatan saja yang kurang. Akan tetapi kesalahan dalam pengelolaan keuangan menjadi salah satu penyebab terjadinya kesulitan ekonomi salahsatunya adalah kemiskinan.

Kesulitan ekonomi tersebut menjadi penghambat dalam proses individu mencapai suatu kesejahteraan, maka dari itu pengelolaan keuangan menjadi suatu kebutuhan agar menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Tanpa adanya perencanaan keuangan hidup yang bagi sebagian besar anggota masyarakat sudah sulit akan menjadi sangat sulit. Oleh karena itu dengan menerapkan cara pengelolaan keuangan yang benar, maka individu diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang dimilikinya. Kebutuhan suatu pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber keuangan pribadinya secara efektif demi kesejahteraannya.

Literasi keuangan juga bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan, mengenai produk lembaga jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat menentukan kebutuhan keuangan yang baik dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

a. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan. Adanya kesadaran ini memiliki efek jangka panjang yang dapat menjaga kondisi keuangan tetap stabil, aman, dan sejahtera. Literasi keuangan tidak hanya penting untuk individu, tetapi juga berpengaruh dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Itulah mengapa salah satu indikator suatu negara mengalami kemajuan ditandai dari adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan.

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2019) menyatakan bahwa literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Berikut ini beberapa uraian penjelasan tentang literasi keuangan yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Menurut Damayanti (2022) Literasi keuangan merupakan kemampuan dan pengetahuan individu tentang berbagai konsep dan risiko dalam manajemen keuangan, serta kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut untuk dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat dan efektif untuk mencapai kesejahteraan finansial bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya.
- b. Menurut Rosa *et al* (2022) literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang atau komunitas untuk mengelola keuangan mereka secara efektif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan mereka.
- c. Menurut Bhushan dalam Arianti (2020:16), mengungkapkan literasi keuangan adalah kemampuan untuk membuat penilaian informasi dan mengambil keputusan yang efektif dan tentang penggunaan dan pengelolaan uang.
- d. Ramadhani *et al* (2020) literasi keuangan adalah gabungan dari kemampuan individu, pengetahuan, serta sikap dan pada akhirnya

perilaku individu yang berkaitan dengan uang, jadi literasi keuangan adalah pengetahuan individu mengenai keuangan dan kemampuan individu untuk membuat sebuah keputusan keuangan yang efektif.

- e. Nicolini (2019) literasi Keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk membuat penilaian berdasarkan informasi dan untuk mengambil keputusan yang efektif mengenai penggunaan dan pengelolaan uang.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa literasi keuangan adalah suatu pengetahuan serta pemahaman seseorang mengenai keuangan dan pengelolaannya dengan baik guna merencanakan kesejahteraan sekarang bahkan untuk dimasa yang akan datang serta mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.

b. Manfaat Literasi Keuangan

Menurut Soetiono dan Setiawan (2018:24) manfaat literasi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Individu

Manfaatnya dapat meningkatkan pemahaman tentang produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

2. Lembaga Keuangan

Manfaatnya untuk meningkatkan kompetisi atau tingkat persaingan yang sehat antara lembaga keuangan.

3. Negara

Manfaatnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

c. Konsep Literasi Keuangan

Konsep literasi keuangan mencakup pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi mengenai konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi/perusahaan, dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu Aribawa (2016).

Konsep pada literasi keuangan dibagi menjadi 2 yaitu penggunaan (*finance application*), dan pemahaman (*finance knowledge*), dengan adanya pengetahuan keuangan yang dimiliki akan memudahkan individu tersebut dalam mengelola keuangannya dengan baik, seperti: bagaimana mengelola pendapatan untuk berinvestasi atau menggunakannya sebagai kebutuhan sehari-hari, yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menggunakan hasil dari investasi tersebut. Halim dan astuti (2015) menjelaskan bahwa pengetahuan keuangan merupakan keterampilan memahami, membuat analisis, dan mengelola keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan keuangan dengan tepat untuk meminimalisir terjadinya persoalan keuangan.

d. Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Kemampuan dan pengetahuan seseorang mengenai keuangan pasti berbeda pada tiap individu dan terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi literasi keuangan. Menurut Riski dan Rini (2015), menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi literasi keuangan adalah gender dan tingkat pendidikan. Sedangkan Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan adalah jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

Setyawati Suroso (2016) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan di Indonesia, di antaranya:

1. Teknologi yang cepat berubah.

Proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

2. Inovasi Pasar.

Penerapan metode pemasaran yang baru atau peningkatan signifikan pada pengemasan atau desain produk, penempatan produk, promosi produk, atau harga.

3. Praktik peminjaman utang yang dianggap meragukan.

Adanya jasa pinjaman dari media online atau aplikasi pinjam yang dapat membahayakan keuangan.

4. Tingkat utang konsumen yang tinggi.

Semakin banyaknya konsumen yang meminjam uang besar karna semakin besarnya kebutuhan hidup.

5. Tingkat simpanan yang rendah.

Tabungan untuk masa depan sangat rendah akibat memenuhi kebutuhan yang seharusnya tidak diperlukan.

6. Perubahan sosial.

Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

7. Tren pasar.

Perubahan atau peningkatan suatu kecenderungan dalam hal produk, teknologi, atau perilaku konsumen.

8. Meningkatnya kesadaran konsumen akan tanggung jawabnya dalam mengelola kredit dan investasi.

e. Indikator Literasi Keuangan

Chen and Volpe dalam Hidayat, S. (2020:130) literasi keuangan terbagi atas 4 indikator, sebagai berikut :

- a. Manajemen keuangan Pribadi (*General Personal Finance*), yaitu kemampuan dasar seorang individu tentang keuangan pribadi yang akan dicapai dan dikeluarkan nantinya karena tiap individu memiliki kebutuhan yang beragam.
- b. Bentuk simpanan dan pinjaman (*Saving and borrowing*), yaitu kemampuan individu dalam memahami hal yang berhubungan dengan tabungan dan pinjaman melalui lembaga keuangan yang akan digunakan dikemudian hari.
- c. Asuransi (*Insurance*), yaitu bentuk usaha dalam mengantisipasi masalah yang akan terjadi kemudian hari dan kerugian yang akan ditanggung dimasa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan pemahaman produk asuransi dari berbagai lembaga yang ada misalnya asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan.
- d. Investasi (*Investment*), yaitu pengalokasian keuangan, menyusun tambahan penghasilan yang dihubungkan dengan mendapatkan manfaat yang melebihi dari investasi yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan pemahaman dan kemampuan dasar mengenai suku bunga, risiko dalam berinvestasi, pasar modal, ataupun deposito. Contohnya seperti investasi rumah, saham, emas, dan sebagainya.

2.1.2 Peran Pemerintah Desa

Kehadiran Pemerintah dan Keberadaan Pemerintah adalah suatu yang menjadi keharusan bagi proses dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah.

Subbag Hukum BPK, (2015:12) Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah desa juga dapat diberikan

penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Pengertian mengenai desa kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa elemen penting dari otonomi Desa yakni kewenangan desa. kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan desa meliputi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pelaksanaan pembangunan desa.
3. Pembinaan masyarakat desa.
4. Pemberdayaan desa.

a. Pengertian Pemerintah Desa

Istilah pemerintah berasal dari kata "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara, bagaimana melaksanakan pengurusan (*eksekutif*) dan (*legislatif*) kepemimpinan dan kordinasi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Secara etimologis dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Berikut ini beberapa uraian penjelasan tentang pemerintah desa yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Menurut Kamaruddin, dkk dalam Adam Latif (2019:35) pemerintahan desa merupakan unit dari lembaga pemerintahan yang paling berdekatan dengan masyarakat.
- b. Menurut Sugiman dalam Sitim Hajar (2018:10) Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman dan damai.
- c. Kusnendar dalam Sitim Hajar (2018:10) pemerintah desa merupakan unit pemerintah paling dasar pada hirarki yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional, yang berarti pemerintah desa merupakan organisasi paling depan dalam menyelenggarakan pelayanan publik karena pemerintah desa langsung melayani masyarakat.
- d. Zainudin dalam Fitri Kurnianingsih (2016:6) pemerintah desa merupakan Unit pelayanan teknis dan masyarakat terdiri dari kepala pelayanan, kepala pemerintahan, dan kepala pelayanan masyarakat.
- e. Sulismadi, dkk dalam Ansahar (2016:25) Pemerintah Desa adalah pemerintah terendah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah secara mandiri termasuk di dalamnya pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa adalah lembaga pemerintah

yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemimpin pemerintah desa adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

b. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sistem pemerintahan di Indonesia memposisikan pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan sangat besar di mana pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang desa ialah Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan kata lain bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memfokuskan program desa terhadap pembangunan desa secara merata, memfasilitasi masyarakat untuk membentuk BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sehingga kehidupan masyarakat akan semakin baik, pendapatan akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa juga sebagai motivator atau pemberi dorongan kepada para warga yang belum bahkan tidak mempunyai pekerjaan tetap sama sekali, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yaitu dengan berternak, karena kedepannya dengan berternak bukan merugikan mereka, akan tetapi dapat menguntungkan bahkan dapat menjadikan sumber mata pencaharian tetap bagi mereka, sehingga kedepannya mereka dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan berternak tersebut dan memberikan sosialisasi kepada

masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan karna dalam pengelolaan keuangan yang baik maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan

dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.

Menurut undang-undang No. 52 Tahun 2009 menyatakan bahwa Keluarga sejahtera, adalah keluarga yang di bentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Berikut ini beberapa uraian penjelasan tentang kesejahteraan masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Takumansang *et al* (2022), kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat di ukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.
- b. Yunara dalam Halil (2019:154) kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang masyarakat merasa aman, makmur dan sentosa, terlepas dari gangguan dan kesukaran.
- c. Rosni dalam Markhamah (2017:7) kesejahteraan masyarakat adalah kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia pada tingkat individu, kelompok atau masyarakat.
- d. Dura (2016:26), kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.
- e. Soetomo (2014:47), kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan

ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.

Berdasarkan dari pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan hidup baik material maupun *non-material*, yang dapat diukur dengan adanya pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata, sehingga dapat membuat seseorang merasa aman, sentosa, makmur, dan selamat.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan atau situasi dimana masyarakat berada dalam kondisi terjamin kebutuhannya, baik dari segi sandang dan pangan, pendidikan, maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan akan kebutuhan hidupnya dan aset-aset yang ada pada mereka.

Michael P. Todaro (2021:178), faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Jumlah Anggota Keluarga

Zaman sekarang tuntutan keluarga semakin meningkat, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan ini akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sedikit.

2. Tempat Tinggal

Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang di atur sesuai selera keindahan, bersih, aman akan menimbulkan suasana yang tenang.

Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur dan kotor tidak jarang akan menimbulkan suasana kebosanan.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi dari pada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat menghormati, toleransi, bantu membantu dan saling mempercayai. Semakin banyak sumber keuangan atau pendapatan yang diterima maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber keuangan/pendapatan dapat diperoleh dari menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang, dan sebagainya.

b. Faktor Eksternal

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan agar tidak terjadi kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga karena hal ini dapat mengganggu kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa atau ketentraman batin anggota keluarga yang datang dari luar lingkungan keluarga antara lain:

1. Faktor Manusia

Iri hati dan fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma.

2. Faktor Alam

Bahaya alam, kerusakan, dan berbagai macam virus penyakit.

3. Faktor Ekonomi Negara

Pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi.

c. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, kerusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto. Menurut

Todaro dalam Setiawan & Nuryadin, (2021). Kesejahteraan suatu wilayah ditentukan dari ketersediaan sumber daya manusia, fisik, dan sumber daya lainnya. Sumberdaya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selanjutnya Todaro menyebutkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang baik, perolehan tingkat pendidikan yang tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), Kesejahteraan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dan dalam penelitian menggunakan indikator kesejahteraan yaitu :

a. Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, agama, serta lingkungan.

b. Kesehatan dan Gizi

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/ wilayah semakin baik.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, daerah darimana asal seseorang, agama, dan gender, berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.

d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia.

e. Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

f. Perumahan dan Lingkungan

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila memiliki perumahan dan lingkungan yang layak huni.

g. Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan indikator dari BPS yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

h. Sosial Lainnya

Aspek sosial lain seperti akses informasi dan hiburan dan akses terhadap media informasi dan komunikasi juga dapat menjadi bagian dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi.

Berdasarkan berbagai indikator yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kesejahteraan bukanlah suatu kondisi yang dapat tercapai dengan sendirinya. Diperlukan upaya-upaya tertentu guna mencapai kondisi kesejahteraan yang dalam hal ini dikenal sebagai upaya pembangunan kesejahteraan.

d. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan masyarakat adalah menjaga dan memelihara keseimbangan atau kesinambungan keberadaan nilai, norma sosial, dan aturan sosial masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pendefenisian makna dan tujuan hidup, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10), Tujuan utama dari sistem kesejahteraan masyarakat yang sampai tingkat tertentu tercemin dalam semua program kesejahteraan masyarakat, ada beberapa tujuan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

e. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat selain memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang layak bagi masyarakat, juga memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan erat terhadap keberfungsian sosial dalam kehidupan. Selain itu kesejahteraan masyarakat juga memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan penyesuaian sosial dan relasi sosial sehingga diharapkan peranan-peranan sosial yang terganggu dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan dan keberfungsian sosial masyarakat dapat kembali normal.

Fungsi kesejahteraan masyarakat menurut Fahrudin (2012:12) adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan masyarakat ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya supaya terhindar dari masalah yang baru.

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan masyarakat ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan masyarakat berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang di dapat dari jurnal sebagai pembanding antara peneliti yang dilakukan peneliti dengan peneliti terdahulu yang telah dilakukan peneliti lain.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian
1	Hasyim (2021) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui literasi keuangan dan pemasaran di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang	Hasil dari kegiatan ini berupa mitra dapat menentukan harga yang wajar untuk setiap produk serta produksi yang lebih cepat dan variatif. Diharapkan kedepan pemasaran yang lebih luas menjangkau regional, nasional maupun Internasional.
2	Sania Alkhoirotun Nisa (2022) Peran Literasi Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung	Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman keluarga di desa simo mengenai literasi keuangan bisa dikatakan cukup baik, ini disebabkan karena setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Sehingga setiap rumah tangga mengatur atau mengelola keuangan mereka sesuai dengan cara mereka masing-masing.
3	Nadia Aulia (2019) Kesejahteraan Keuangan Keluarga Usia Pensiun: Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan Hari Tua, dan Kepemilikan Aset	Hasilnya adalah Rata-rata indeks literasi keuangan dan kesejahteraan keuangan di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Faktor yang berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan keuangan keluarga adalah

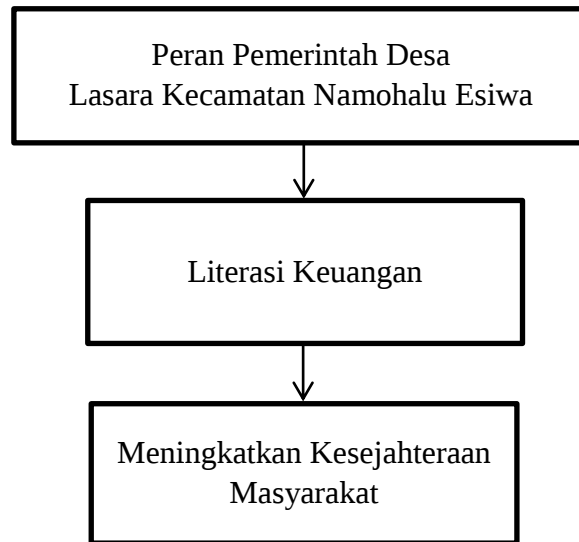
		wilayah, pendidikan, literasi keuangan, perencanaan keuangan hari tua, dan kepemilikan aset.
4	Syanindita Prameswari (2023) Pengaruh Literasi Keuangan, Kesadaran Keuangan, Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keuangan dengan Perilaku Keuangan dan Inklusi Keuangan	Hasil penelitian ini bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku keuangan dan inklusi keuangan keluarga di Kota Surabaya. Namun literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keuangan keluarga di Kota Surabaya.
5	Maria Rista Ulfa (2023) literasi Finansial Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Sidorejo	Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi masyarakat agar dapat meminimalisasi, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan sehingga mengerakkan roda perekonomian menjadi lebih cepat.

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017:92) kerangka berpikir adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal. Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah literasi keuangan, peran pemerintah desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Desa Lasara Kecamatan Namohalu Esiwa memiliki tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah akan hal Literasi Keuangan. Oleh karena itu pemerintah desa membentuk BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Literasi Keuangan guna untuk peningkatan atau perubahan dalam proses pengelolaan keuangan dalam masyarakat, sehingga bisa lebih paham dalam pengelolaan keuangannya sendiri yang akhirnya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa Lasara Kecamatan Namohalu Esiwa. Dengan demikian kerangka berpikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran